



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 April 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JASRIZAL
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 15277

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 419.500.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI
Rp. 19.500.000
2. Bangunan Seluas 120 m2 di KOTA PAYAKUMBUH , HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/126 m2 di KOTA
PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 250.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL
SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA GRAND SEPEDA MOTOR Tahun
1995, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI NINJA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1995, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000
5. MOTOR, KAWASAKI NINJA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 30.000.000
6. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	57.200.510
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	726.700.510
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	726.700.510

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **5 September 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.